Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis
2026, Vol. 4, No. 3, pp. 894-908
E-ISSN: 3031-7150

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Islam Cahaya Khalifah Palu

Afriani[1]✉, Sugianto[2], Betty[3], Muhammad Iqbal[4]
(1,2,3,4) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Indonesia

Abstrak: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang baik serta meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui perencanaan berdasarkan RKAS, pelaksanaan sesuai petunjuk teknis, administrasi keuangan yang tertib, serta pertanggungjawaban melalui pelaporan menggunakan aplikasi ARKAS. Prinsip transparansi diwujudkan melalui pelibatan komite sekolah dalam penyusunan RKAS, penyampaian informasi kepada warga sekolah, penyediaan papan informasi penggunaan Dana BOS, serta keterbukaan terhadap monitoring dari Dinas Pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah mencerminkan prinsip *good governance* melalui penerapan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Article history:
Received: 16 July 2026
Revised: 24 July 2026
Accepted: 25 July 2026
Published: 27 July 2026

Kata kunci:
Akuntabilitas, Transparansi, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pengelolaan Keuangan Sekolah, *Good Governance*

Abstract: *Accountable and transparent management of School Operational Assistance (BOS) funds is essential to achieving good school financial governance and improving the quality of education. This study aims to analyze the implementation of accountability and transparency in the management of BOS funds at SD Islam Cahaya Khalifah Palu. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the principal, BOS treasurer, teachers, and the school committee. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, including data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source triangulation. The findings indicate that accountability has been implemented through planning based on the School Activity and Budget Plan (RKAS), implementation in accordance with technical guidelines, proper financial administration, and reporting using the ARKAS application. Transparency is reflected in the involvement of the school committee in planning, dissemination of financial information to school stakeholders, the provision of information boards, and openness to supervision by the Education Office. The study concludes that the management of BOS funds at SD Islam Cahaya Khalifah Palu reflects the principles of good governance through accountability, transparency, and compliance with applicable regulations.*

Keyword:
Accountability, Transparency, School Operational Assistance (BOS), Funds School Financial Management, Good Governance

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Afriani, A., Sugianto, S., Betty, B., & Iqbal, M. (2026). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Islam Cahaya Khalifah Palu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, *4*(3), 894–908. https://doi.org/10.70716/emis.v4i3.754

✉ *Corresponding author:* ***afrianiaffi2@gmail.com***

Copyright © 2026, the author(s)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu, pemerintah Indonesia menyediakan berbagai program pembiayaan, salah satunya melalui Program Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Islam Cahaya Khalifah Palu (BOS). Program ini bertujuan membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasional nonpersonalia sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan merata. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana BOS tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga harus mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pengelola keuangan publik untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, penggunaan sumber daya, dan hasil yang dicapai kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi adalah keterbukaan dalam menyediakan informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses mengenai pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018). Dalam konteks Dana BOS, kedua prinsip tersebut menjadi landasan penting agar penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis, kebutuhan sekolah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan Dana BOS. Dinata et al. (2023) menegaskan bahwa penyusunan RKAS sesuai petunjuk teknis, pelaporan keuangan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi indikator penting tata kelola Dana BOS yang baik. Panjaitan et al. (2025) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas harus diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Temuan serupa diperkuat oleh Wiguna, Kartini, dan Nurmilah (2024), Fadhilah et al. (2023), Hidayah, Tikollah, dan Idrus (2025), Handayani, Khoiri, dan Abdullah (2025), Innawati, Dewi, dan Partiwi (2024), Ameliawati, Kurnia, dan Salsabilla (2025), Musfirah, Nurlaila, dan Nasution (2024), serta Manuhutu dan Adriansyah (2024), yang secara umum menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana BOS dipengaruhi oleh perencanaan yang partisipatif, kepatuhan terhadap regulasi, penggunaan ARKAS, tertib administrasi, pengawasan internal, dan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan yang cukup nyata. Sebagian besar studi menilai akuntabilitas dan transparansi dari sisi kepatuhan administratif, efektivitas penggunaan anggaran, atau kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, banyak penelitian dilakukan pada sekolah negeri atau menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan hubungan antarvariabel, sehingga belum banyak mengungkap bagaimana akuntabilitas dan transparansi dibangun dalam praktik sehari-hari melalui interaksi antara kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan yayasan. Kajian yang secara khusus menyoroti sekolah dasar swasta berbasis Islam juga masih sangat terbatas. Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang masih terbuka bukan hanya terletak pada lokasi dan jenis sekolah, tetapi juga pada minimnya pemahaman mengenai proses sosial dan organisasional yang membentuk praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS. Inilah research gap yang ingin diisi oleh penelitian ini, yaitu belum adanya pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diimplementasikan secara utuh pada sekolah dasar swasta berbasis Islam.

SD Islam Cahaya Khalifah Palu merupakan salah satu sekolah dasar swasta yang menerima Dana BOS sebagai sumber pembiayaan operasional sekolah. Pengelolaan Dana BOS di sekolah ini melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan yayasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kondisi tersebut menjadikan sekolah ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana prinsip

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

akuntabilitas dan transparansi dijalankan dalam praktik pengelolaan Dana BOS, sekaligus bagaimana kolaborasi antaraktor sekolah membentuk tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak hanya terletak pada penggunaan analisis *Coding* dalam pengolahan data wawancara, tetapi terutama pada kontribusi ilmiahnya dalam menjelaskan proses terbentuknya akuntabilitas dan transparansi sebagai praktik tata kelola yang saling berkaitan. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa implementasi Dana BOS tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan terhadap petunjuk teknis, melainkan juga oleh dinamika kolaborasi antaraktor sekolah, pemanfaatan sistem ARKAS, mekanisme pengawasan internal, dan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan pendidikan, khususnya pada konteks sekolah dasar swasta berbasis Islam yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai tata kelola keuangan pendidikan serta menjadi masukan praktis bagi kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan Dana BOS yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan transparansi pengelolaan Dana BOS berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu objek penelitian, yaitu SD Islam Cahaya Khalifah Palu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi dalam konteks nyata sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik pengelolaan Dana BOS di sekolah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Cahaya Khalifah Palu yang berlokasi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu satuan pendidikan dasar penerima Dana BOS yang menerapkan sistem pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan pemerintah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengelolaannya.

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada akhir bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2026 melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana BOS. Informan penelitian terdiri atas:

1. Kepala Sekolah SD Islam Cahaya Khalifah Palu;
2. Bendahara Dana BOS;
3. Guru yang terlibat dalam penyusunan RKAS dan pelaksanaan program sekolah;
4. Ketua Komite Sekolah.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Pemilihan empat informan dianggap memadai karena seluruh informan merupakan aktor utama yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan Dana BOS, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Selama proses pengumpulan data, informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang relatif konsisten dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan pada wawancara berikutnya. Oleh karena itu, proses pengumpulan data dihentikan karena telah mencapai kejenuhan data (data saturation), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah mampu menjawab fokus penelitian secara menyeluruh.

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini disusun sebagai dasar penyusunan pedoman wawancara sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Konsep akuntabilitas mengacu pada kewajiban pengelola Dana BOS untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan dana secara administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, konsep transparansi mengacu pada keterbukaan sekolah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan Dana BOS kepada pemangku kepentingan.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Indikator	Fokus Pertanyaan Wawancara
Akuntabilitas	Perencanaan RKAS	Proses penyusunan RKAS dan pihak yang terlibat
	Pelaksanaan Dana BOS	Kesesuaian penggunaan dana dengan RKAS dan Juknis BOS
	Pertanggungjawaban	Penyusunan laporan keuangan, BKU, dan ARKAS
	Pengawasan	Monitoring kepala sekolah, komite, dan dinas pendidikan
Transparansi	Keterbukaan informasi	Penyampaian informasi penggunaan Dana BOS
	Akses informasi	Kemudahan warga sekolah memperoleh informasi
	Partisipasi	Keterlibatan guru, komite, dan yayasan
	Publikasi	Penyampaian laporan melalui papan informasi atau media lainnya

Indikator tersebut menjadi dasar dalam menyusun pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan implementasi akuntabilitas dan transparansi secara komprehensif.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. **Data primer** diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan serta hasil observasi terhadap proses pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu.
2. **Data sekunder** diperoleh melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS, antara lain Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan realisasi penggunaan Dana BOS, Buku Kas Umum (BKU), bukti transaksi, serta dokumen administrasi lain yang mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik.

1. Wawancara: Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan transparansi pengelolaan Dana BOS.
2. Observasi: Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan Dana BOS di sekolah, meliputi penyusunan RKAS, penggunaan aplikasi ARKAS, pencatatan transaksi keuangan, penyimpanan dokumen administrasi, serta penyampaian informasi penggunaan Dana BOS.
3. Dokumentasi: Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS, seperti RKAS, laporan realisasi penggunaan Dana BOS, Buku Kas Umum, bukti transaksi, foto kegiatan, dan dokumen administrasi lainnya.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan.

1. Kondensasi Data (Data Condensation): Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsikan, dipilih, disederhanakan, kemudian difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS.
2. Penyajian Data (Data Display): Data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel *Coding*, matriks hasil wawancara, dan dokumentasi sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar temuan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification): Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh. Kesimpulan kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan kembali terhadap data lapangan sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipercaya.

Selain menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), validasi hasil analisis dilakukan melalui proses triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan untuk memastikan bahwa temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Proses *Coding* Data

Analisis data dilakukan melalui proses *Coding* secara bertahap setelah seluruh hasil wawancara ditranskripsikan. Tahap pertama adalah open *Coding*, yaitu mengidentifikasi kata kunci, frasa, atau pernyataan penting yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS. Pada tahap ini setiap informasi diberi kode awal sesuai makna yang muncul dari data.

Tahap kedua adalah axial *Coding*, yaitu mengelompokkan kode-kode yang memiliki keterkaitan ke dalam kategori yang lebih luas, seperti perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan keterbukaan informasi. Pengelompokan ini bertujuan untuk menemukan hubungan antar kategori berdasarkan kesamaan makna.

Tahap ketiga adalah *selective Coding*, yaitu mengintegrasikan seluruh kategori menjadi tema utama penelitian, yakni implementasi akuntabilitas dan implementasi transparansi pengelolaan Dana BOS. Tema-tema tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil observasi, dokumentasi, serta teori dan penelitian terdahulu sehingga menghasilkan interpretasi yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu.

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dengan dokumen pendukung yang dimiliki sekolah untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data.

Tabel 2. Contoh Proses *Coding* Hasil Wawancara

Informan	Kutipan Wawancara	Open *Coding*	Axial *Coding*	*Selective Coding* (Tema)
Kepala Sekolah	"Perencanaan Dana BOS dilakukan berdasarkan hasil analisis Rapor Pendidikan melalui aplikasi ARKAS."	Rapor Pendidikan, ARKAS, Perencanaan	Perencanaan Dana BOS	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Kepala Sekolah	"Pertanggungjawaban dilakukan sesuai petunjuk teknis dengan selalu berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan."	Pertanggungjawaban, Juknis BOS, Koordinasi	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Kepala Sekolah	"Komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan RKAS serta tersedia papan informasi penggunaan Dana BOS."	Komite, RKAS, Papan Informasi	Keterbukaan Informasi	Transparansi Pengelolaan Dana BOS
Bendahara BOS	"RKAS disusun oleh kepala sekolah dan bendahara BOS kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan."	RKAS, Verifikasi, Dinas Pendidikan	Perencanaan dan Verifikasi	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Bendahara BOS	"Seluruh pengeluaran dicatat melalui ARKAS dan dilengkapi kuitansi, nota, faktur, serta dokumentasi."	ARKAS, Bukti Transaksi, Dokumentasi	Administrasi Keuangan	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Bendahara BOS	"Informasi penggunaan Dana BOS disampaikan melalui rapat guru dan komite serta papan informasi."	Rapat, Komite, Papan Informasi	Penyampaian Informasi	Transparansi Pengelolaan Dana BOS
Guru	"Saya tidak terlibat langsung dalam penyusunan RKAS, tetapi setelah selesai pihak sekolah memaparkan penggunaan Dana BOS kepada seluruh guru."	Sosialisasi RKAS, Informasi Guru	Keterbukaan Internal	Transparansi Pengelolaan Dana BOS
Guru	"Dana BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, pengadaan alat tulis, media pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler."	Kebutuhan Pembelajaran, Sarana	Pemanfaatan Dana BOS	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS
Guru	"Sekolah telah menerapkan transparansi dengan baik karena seluruh penggunaan Dana BOS dipaparkan kepada guru."	Transparansi, Penyampaian Informasi	Keterbukaan Informasi	Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan proses *open Coding*, peneliti mengidentifikasi kata kunci yang muncul dari hasil wawancara, seperti RKAS, ARKAS, pelaporan, bukti transaksi, komite sekolah, papan informasi, dan keterbukaan informasi. Selanjutnya, melalui *axial Coding*, kode-kode yang memiliki keterkaitan dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, administrasi keuangan, dan keterbukaan informasi. Pada tahap *selective Coding*, seluruh kategori tersebut disintesiskan menjadi dua tema utama penelitian, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan hasil dan pembahasan penelitian.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Tabel 3. Matriks Sintesis Temuan Penelitian

Tema	Subtema	Informan Pendukung	Temuan Utama
Akuntabilitas	Perencanaan	Kepala Sekolah, Bendahara BOS	RKAS disusun berdasarkan kebutuhan sekolah melalui ARKAS dan diverifikasi Dinas Pendidikan.
Akuntabilitas	Pelaksanaan	Bendahara BOS, Guru	Penggunaan Dana BOS sesuai RKAS dan petunjuk teknis untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban	Kepala Sekolah, Bendahara BOS	Pelaporan dilakukan melalui BKU, ARKAS, dan dokumen pendukung serta diperiksa oleh Dinas Pendidikan.
Transparansi	Keterbukaan Informasi	Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru	Informasi penggunaan Dana BOS disampaikan melalui rapat guru, komite sekolah, dan papan informasi.
Transparansi	Partisipasi	Kepala Sekolah, Komite Sekolah	Komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan RKAS sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan Dana BOS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Perencanaan Dana BOS

Tabel 4. Matriks Temuan Utama Perencanaan Dana BOS

Aspek	Temuan Utama	Sumber Data
Dasar Perencanaan	RKAS disusun berdasarkan analisis Rapor Pendidikan dan kebutuhan sekolah.	Wawancara, observasi, dokumentasi
Penyusunan Anggaran	Penyusunan RKAS dilakukan melalui aplikasi ARKAS sesuai petunjuk teknis Dana BOS.	Wawancara Kepala Sekolah dan Bendahara BOS
Partisipasi	Kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan yayasan terlibat sesuai fungsi masing-masing dalam proses perencanaan.	Wawancara Kepala Sekolah dan Guru
Pengendalian	RKAS diverifikasi oleh Dinas Pendidikan sebelum Dana BOS dapat digunakan.	Wawancara Kepala Sekolah dan Bendahara BOS
Akuntabilitas	Seluruh proses perencanaan terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.	Dokumentasi RKAS dan hasil observasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru, diketahui bahwa penyusunan RKAS diawali dengan analisis Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas sekolah. RKAS kemudian disusun melalui aplikasi ARKAS dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan yayasan sesuai peran masing-masing. Setelah selesai disusun, RKAS diverifikasi oleh Dinas Pendidikan sebelum menjadi dasar pencairan dan penggunaan Dana BOS.

Kepala sekolah menjelaskan bahwa proses perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah yang dianalisis melalui Rapor Pendidikan, kemudian dituangkan ke dalam RKAS sesuai petunjuk teknis Dana BOS. Bendahara BOS menambahkan bahwa penyusunan RKAS dilakukan melalui aplikasi ARKAS dan harus memperoleh persetujuan dari Dinas Pendidikan sebelum dana dapat dicairkan. Sementara itu, guru menyampaikan bahwa meskipun tidak terlibat secara langsung dalam

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

penyusunan RKAS, pihak sekolah menyampaikan hasil perencanaan kepada seluruh guru sebagai bentuk komunikasi internal.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh observasi dan dokumentasi yang menunjukkan adanya dokumen RKAS, penggunaan aplikasi ARKAS, serta bukti verifikasi dari Dinas Pendidikan. Kesesuaian informasi yang diperoleh dari ketiga informan dan dokumen pendukung menunjukkan bahwa proses perencanaan Dana BOS telah dilaksanakan secara sistematis serta memenuhi prinsip akuntabilitas melalui mekanisme perencanaan yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas pada tahap perencanaan tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap petunjuk teknis Dana BOS, tetapi juga oleh koordinasi yang baik antaraktor sekolah. Keterlibatan kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan yayasan memungkinkan penyusunan RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata sekolah sehingga alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, penggunaan aplikasi ARKAS berperan sebagai instrumen yang membantu sekolah menyusun anggaran secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan sesuai dengan regulasi.

Temuan tersebut sejalan dengan Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik dimulai sejak tahap perencanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mardiasmo (2018) yang menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang baik merupakan fondasi bagi terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Wiguna, Kartini, dan Nurmilah (2024), Fadhilah et al. (2023), Hidayah, Tikollah, dan Idrus (2025), serta Panjaitan, Kewo, dan Moroki (2025) yang menyatakan bahwa penyusunan RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis merupakan indikator utama akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.

Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang memperkaya penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya umumnya menekankan kepatuhan terhadap regulasi sebagai indikator akuntabilitas, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas juga dibentuk oleh kolaborasi antaraktor sekolah, komunikasi internal, serta pemanfaatan sistem informasi melalui aplikasi ARKAS. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai proses tata kelola yang melibatkan koordinasi, partisipasi, dan pengendalian secara berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah perlu mempertahankan mekanisme perencanaan yang partisipatif dalam penyusunan RKAS, bendahara BOS perlu mengoptimalkan penggunaan ARKAS sebagai instrumen pengendalian administrasi keuangan, sedangkan komite sekolah perlu terus dilibatkan sebagai bentuk pengawasan dan representasi masyarakat. Bagi pemerintah daerah, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah swasta agar kualitas perencanaan Dana BOS semakin akuntabel dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah memenuhi prinsip akuntabilitas melalui penyusunan RKAS berdasarkan analisis kebutuhan sekolah, penggunaan aplikasi ARKAS, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, serta verifikasi oleh Dinas Pendidikan. Temuan ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik dengan menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS pada sekolah dasar swasta berbasis Islam dibangun melalui kombinasi antara kepatuhan terhadap regulasi, kolaborasi antaraktor, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS

Tabel 5. Matriks Temuan Utama Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS

Aspek	Temuan Utama	Sumber Data
Kesesuaian Pelaksanaan	Penggunaan Dana BOS dilaksanakan sesuai RKAS dan petunjuk teknis Dana BOS.	Wawancara Kepala Sekolah dan Bendahara BOS
Administrasi Keuangan	Setiap transaksi dicatat, dilengkapi bukti pengeluaran, dan diinput ke aplikasi ARKAS.	Wawancara Bendahara BOS, Dokumentasi
Pemanfaatan Dana	Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dan proses pembelajaran.	Wawancara Guru, Observasi
Pengawasan	Pelaksanaan penggunaan dana dipantau melalui dokumen administrasi dan laporan realisasi penggunaan Dana BOS.	Dokumentasi dan Observasi
Akuntabilitas	Penggunaan dana terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.	Hasil triangulasi data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru, diketahui bahwa seluruh penggunaan Dana BOS dilaksanakan sesuai dengan RKAS yang telah disusun dan mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS. Setiap pengeluaran didukung oleh bukti transaksi, dicatat secara tertib, dan diinput ke dalam aplikasi ARKAS sebagai bagian dari administrasi serta pelaporan keuangan sekolah.

Kepala sekolah menjelaskan bahwa penggunaan Dana BOS selalu mengacu pada RKAS yang telah disahkan sehingga setiap kegiatan memiliki dasar perencanaan yang jelas. Bendahara BOS menambahkan bahwa seluruh transaksi keuangan dilengkapi dengan bukti pengeluaran, seperti nota dan kuitansi, kemudian dicatat dalam administrasi keuangan sekolah dan diinput ke aplikasi ARKAS. Sementara itu, guru menyampaikan bahwa Dana BOS memberikan manfaat nyata dalam mendukung penyediaan alat tulis, media pembelajaran, bahan habis pakai, dan berbagai kegiatan sekolah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh observasi dan dokumentasi yang menunjukkan adanya Buku Kas Umum (BKU), laporan realisasi penggunaan Dana BOS, kuitansi, faktur pembelian, serta dokumen administrasi lainnya yang tersusun secara sistematis. Kesesuaian informasi dari seluruh informan dan dokumen pendukung menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan Dana BOS telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta memenuhi prinsip akuntabilitas melalui administrasi keuangan yang tertib dan terdokumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan penggunaan Dana BOS dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsistensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKAS, kedisiplinan dalam pencatatan administrasi keuangan, pemanfaatan aplikasi ARKAS, serta adanya pengawasan dari kepala sekolah dan Dinas Pendidikan. Faktor-faktor tersebut berperan dalam meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, pemanfaatan Dana BOS yang diarahkan pada kebutuhan pembelajaran menunjukkan bahwa dana tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan layanan pendidikan.

Temuan ini sejalan dengan Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta didukung oleh administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mardiasmo (2018) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Fadhilah et al. (2023), Hidayah, Tikollah, dan Idrus (2025), Handayani, Khoiri, dan Abdullah (2025), Wiguna, Kartini, dan Nurmilah (2024), serta Panjaitan et al. (2025) yang menunjukkan bahwa

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

kesesuaian penggunaan Dana BOS dengan RKAS, tertib administrasi, serta pemanfaatan aplikasi ARKAS merupakan indikator penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.

Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan kepatuhan terhadap petunjuk teknis dan kelengkapan administrasi sebagai ukuran akuntabilitas. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas juga tercermin dari kemampuan sekolah mengarahkan penggunaan Dana BOS untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran secara nyata. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari sejauh mana penggunaan dana memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah perlu memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada RKAS yang telah disusun, sedangkan bendahara BOS perlu mempertahankan ketertiban administrasi dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi ARKAS dalam pencatatan transaksi. Komite sekolah diharapkan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS, sementara pemerintah daerah dapat meningkatkan pendampingan dan monitoring agar pelaksanaan pengelolaan Dana BOS di sekolah swasta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi sekolah lain yang memiliki karakteristik serupa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam membangun sistem pelaksanaan Dana BOS yang akuntabel, tertib administrasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penggunaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah memenuhi prinsip akuntabilitas melalui penggunaan dana yang sesuai dengan RKAS, pencatatan transaksi yang tertib, pemanfaatan aplikasi ARKAS, serta dukungan dokumen administrasi yang lengkap. Temuan ini memberikan kontribusi empiris bahwa keberhasilan pelaksanaan Dana BOS pada sekolah dasar swasta tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh penguatan sistem administrasi, koordinasi antaraktor sekolah, serta orientasi penggunaan dana pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Pertanggungjawaban Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palifah Palu telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil *Coding* terhadap wawancara kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru, diperoleh tema utama berupa pelaporan penggunaan dana sesuai petunjuk teknis, pencatatan transaksi secara sistematis, kelengkapan bukti administrasi, pemanfaatan aplikasi ARKAS, serta pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya dipahami sebagai penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai rangkaian proses administrasi yang menjamin setiap penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 6. Ringkasan Temuan Pertanggungjawaban Dana BOS

Aspek	Temuan Utama	Bukti
Pelaporan	Laporan disusun sesuai juknis BOS	Laporan realisasi BOS dan ARKAS
Administrasi	Seluruh transaksi dicatat dan memiliki bukti	BKU, kuitansi, nota
Sistem Pelaporan	Menggunakan aplikasi ARKAS	Dokumen ARKAS
Pengawasan	Laporan diverifikasi kepala sekolah dan diperiksa Dinas Pendidikan	Dokumen monitoring

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah menjelaskan seluruh penggunaan Dana BOS dipertanggungjawabkan sesuai petunjuk teknis melalui laporan realisasi yang didukung bukti transaksi dan dilaporkan melalui aplikasi ARKAS maupun secara manual. Bendahara BOS menambahkan bahwa setiap transaksi dicatat dalam pembukuan, dilengkapi nota atau kuitansi, kemudian direkap menjadi laporan realisasi sebelum disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Guru juga

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

mengonfirmasi bahwa setiap kegiatan yang menggunakan Dana BOS selalu disertai laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab sekolah terhadap dana yang diterima dari pemerintah.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi. Peneliti menemukan dokumen pertanggungjawaban berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, laporan realisasi penggunaan Dana BOS, kuitansi, faktur pembelian, serta arsip pelaporan melalui aplikasi ARKAS. Kelengkapan dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara sistematis dan siap untuk keperluan monitoring maupun audit oleh Dinas Pendidikan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat dipahami bahwa akuntabilitas di SD Islam Cahaya Khalifah Palu tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan, tetapi juga melalui tertib administrasi dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Integrasi antara pencatatan manual dan aplikasi ARKAS memperkuat validitas laporan karena setiap transaksi memiliki bukti yang dapat ditelusuri.

Temuan ini sejalan dengan Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik diwujudkan melalui kewajiban organisasi mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara terbuka dan dapat diverifikasi. Demikian pula Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan instrumen evaluasi sekaligus bentuk kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Hidayah, Tikollah, dan Idrus (2025), Musfirah, Nurlaila, dan Nasution (2024), serta Wiguna, Kartini, dan Nurmilah (2024) yang menyimpulkan bahwa kualitas pertanggungjawaban Dana BOS dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi, pembukuan yang tertib, dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik karena menunjukkan bahwa pada sekolah dasar swasta berbasis Islam, akuntabilitas dibangun melalui koordinasi yang kuat antara kepala sekolah, bendahara BOS, guru, yayasan, dan komite sekolah. Kolaborasi tersebut memungkinkan setiap proses pelaporan tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian internal dalam pengelolaan Dana BOS.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan aplikasi ARKAS tidak hanya mempermudah penyusunan laporan, tetapi juga meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan, realisasi anggaran, dan bukti transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi menjadi faktor penting yang mendukung kualitas akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. Temuan tersebut memperluas hasil penelitian Handayani, Khoiri, dan Abdullah (2025) yang menitikberatkan manfaat ARKAS pada aspek pelaporan, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa ARKAS juga memperkuat pengendalian administrasi dan memudahkan proses verifikasi oleh pihak pengawas.

Dari perspektif teori, hasil penelitian ini memperkuat konsep *good governance*, khususnya prinsip akuntabilitas, yang tidak hanya diukur dari keberadaan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga dari kualitas proses administrasi, koordinasi antaraktor, dan pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan keuangan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan secara nyata dalam konteks sekolah dasar swasta berbasis Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi. Bagi kepala sekolah, penting untuk mempertahankan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pelaporan Dana BOS. Bagi bendahara BOS, konsistensi pencatatan transaksi dan pengarsipan bukti administrasi perlu terus dijaga untuk mendukung kualitas laporan. Bagi komite sekolah, keterlibatan dalam monitoring dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS. Sementara itu, bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan ARKAS tetap diperlukan agar kualitas pertanggungjawaban sekolah semakin baik.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi sekolah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam mengembangkan tata kelola Dana BOS yang akuntabel.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah memenuhi prinsip akuntabilitas melalui penyusunan laporan sesuai petunjuk teknis, pencatatan transaksi yang tertib, kelengkapan dokumen administrasi, pemanfaatan aplikasi ARKAS, serta mekanisme pengawasan oleh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah membangun sistem pertanggungjawaban yang sistematis, dapat diverifikasi, dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan pendidikan yang baik.

Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah menerapkan prinsip transparansi. Berdasarkan hasil *Coding* terhadap wawancara kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru, diperoleh tema utama berupa keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RKAS, penyampaian informasi penggunaan Dana BOS kepada guru, penyediaan papan informasi penggunaan Dana BOS, serta keterbukaan terhadap monitoring oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.

Tabel 7. Ringkasan Temuan Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Aspek Transparansi	Temuan Utama	Bukti
Partisipasi	Komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan RKAS	Hasil wawancara kepala sekolah
Penyampaian Informasi	Informasi penggunaan Dana BOS disampaikan kepada guru melalui rapat	Hasil wawancara guru
Keterbukaan Publik	Tersedia papan informasi penggunaan Dana BOS	Hasil observasi
Monitoring	Dokumen siap diperiksa Dinas Pendidikan dan Inspektorat	Hasil dokumentasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah menjelaskan transparansi diwujudkan melalui pelibatan komite sekolah dalam penyusunan RKAS serta penyediaan papan informasi penggunaan Dana BOS yang dapat diakses oleh orang tua dan masyarakat. Bendahara BOS menambahkan bahwa laporan penggunaan Dana BOS disusun secara lengkap, disampaikan kepada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, serta selalu siap diperiksa oleh Dinas Pendidikan maupun Inspektorat. Guru juga mengonfirmasi bahwa informasi mengenai penggunaan Dana BOS secara rutin disampaikan melalui rapat guru sehingga seluruh tenaga pendidik mengetahui program yang didanai dan pemanfaatan anggaran sekolah.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi. Peneliti menemukan adanya papan informasi realisasi penggunaan Dana BOS di lingkungan sekolah, dokumen laporan penggunaan Dana BOS yang tersusun secara sistematis, serta arsip administrasi yang dapat ditunjukkan ketika dilakukan monitoring. Hasil observasi ini memperkuat temuan wawancara bahwa sekolah telah menyediakan akses informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk keterbukaan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa transparansi di SD Islam Cahaya Khalifah Palu tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian laporan penggunaan dana, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah dengan guru, komite sekolah, orang tua peserta didik, dan pemerintah daerah. Keterbukaan informasi tersebut mendorong terciptanya pengawasan bersama sehingga penggunaan Dana BOS dapat berlangsung secara lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Krina (2003) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip *good governance* yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik secara terbuka. Mardiasmo (2018) juga menjelaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu prasyarat terciptanya tata kelola keuangan publik yang baik karena meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hidayah, Tikollah, dan Idrus (2025), Dinata et al. (2023), serta Musfirah, Nurlaila, dan Nasution (2024) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan Dana BOS diwujudkan melalui pelibatan komite sekolah dalam penyusunan RKAS, penyampaian informasi penggunaan dana kepada warga sekolah, dan penyediaan laporan yang dapat diakses oleh pihak terkait. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik karena menunjukkan bahwa pada sekolah dasar swasta berbasis Islam, transparansi tidak hanya bergantung pada penyediaan dokumen administrasi, tetapi juga dibangun melalui komunikasi yang intensif antara kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan yayasan. Pola komunikasi tersebut menciptakan pemahaman bersama mengenai penggunaan Dana BOS sehingga memperkuat kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan aplikasi ARKAS berkontribusi dalam mendukung transparansi karena memudahkan penyusunan laporan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas transparansi tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, melainkan juga oleh komitmen pihak sekolah dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini memperluas hasil penelitian Handayani, Khoiri, dan Abdullah (2025) yang lebih menitikberatkan pada manfaat ARKAS dalam aspek administrasi, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi yang efektif merupakan kombinasi antara pemanfaatan teknologi, komunikasi organisasi, dan partisipasi stakeholder.

Dari perspektif teori, hasil penelitian ini memperkuat konsep *good governance*, khususnya prinsip transparansi, yang tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi secara administratif, tetapi juga sebagai proses membangun partisipasi, pengawasan, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai implementasi transparansi dalam pengelolaan Dana BOS pada sekolah dasar swasta berbasis Islam yang selama ini masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian terdahulu.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Bagi kepala sekolah, transparansi perlu terus diperkuat melalui penyampaian informasi yang konsisten kepada seluruh warga sekolah dan komite. Bagi bendahara BOS, kelengkapan administrasi dan kemudahan akses terhadap dokumen keuangan perlu dipertahankan untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi. Bagi komite sekolah, keterlibatan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan akuntabilitas sekolah. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pendampingan dan monitoring berkala agar praktik transparansi dapat diterapkan secara konsisten. Sementara itu, bagi sekolah lain yang memiliki karakteristik serupa, temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam membangun tata kelola Dana BOS yang lebih terbuka, partisipatif, dan dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah diterapkan dengan baik melalui pelibatan komite sekolah dalam penyusunan RKAS, penyampaian informasi penggunaan Dana BOS kepada guru dan warga sekolah, penyediaan papan informasi sebagai media keterbukaan publik, serta kesiapan sekolah dalam menghadapi proses monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan maupun Inspektorat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya memenuhi tuntutan administratif, tetapi juga menjadi mekanisme untuk membangun partisipasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat tata kelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip *good governance*.

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SD Islam Cahaya Khalifah Palu telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah, penggunaan aplikasi ARKAS dalam administrasi dan pelaporan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang didukung oleh bukti administrasi yang lengkap. Sementara itu, transparansi tercermin melalui pelibatan komite sekolah dalam proses perencanaan, penyampaian informasi penggunaan Dana BOS kepada warga sekolah, penyediaan media informasi kepada masyarakat, serta keterbukaan terhadap proses monitoring dan evaluasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan pendidikan dengan menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap petunjuk teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan, tertib administrasi, dan keterbukaan informasi. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan Dana BOS yang dapat dijadikan referensi bagi kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah, khususnya pada sekolah dasar swasta.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu sekolah dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh satuan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain studi multi-kasus dengan melibatkan sekolah negeri dan swasta dari berbagai daerah, menambah jumlah informan seperti orang tua peserta didik dan pengawas sekolah, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, guru, dan Bendahara BOS SD Islam Cahaya Khalifah Palu yang telah memberikan izin, informasi, serta dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako atas arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan tata kelola pengelolaan Dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

Ameliawati, L., Kurnia, T., & Salsabilla, N. (2025). Perbandingan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri dan SD Swasta. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, *10*(2). 110-1124. https://doi.org/10.35968/jbau

Batubara, T. B., Nasution, Y. S. J., & Yanti, N. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, *12*(2), 138-147. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329

Dinata, H. S., Putri, A. M., & Aristi, M. D. (2023). Analisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMAN 12 Kota Pekanbaru. *AKUNTANSI'45*, *4*(1), 49–57. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.852

Handayani, T. P., Khoiri, N., & Abdullah, G. (2026). Transparency in the Management of School Operational Assistance Funds through the Implementation of the School Activity and Budget

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Plan Application. *SOSIOEDUKASI: JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, *15*(2), 1314-1323. https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i2.8029

Hidayah, N., Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2025). Accountability and transparency in School Operational Assistance Fund management: Evidence from Indonesian elementary schools. *Journal of Public Sector Accounting*, *8*(1), 35–49.

Innawati, I., Dewi, M. W., & Partiwi, D. N. (2024). Pengaruh akuntabilitas, pengawasan, dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Mojosongo. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, *3*(1), 456–463. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.93

Krina, L. L. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas*, *transparansi*, *dan partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mahmudi. (2019). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.

Maimunah, S., & Elgina, S. (2023). Analisis implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, *9*(2), 41-56. https://doi.org/10.34204/jiafe.v9i2.8919

Manuhutu, M., & Adriansyah, A. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana BOS (Studi kasus di SMP Negeri 31 Maluku Tengah). *Accounting Information System*, *Taxes and Auditing Journal (AISTA Journal)*, *3*(2). https://doi.org/10.30630/aista.v3i2.68

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.

Musfirah, A. F., Nurlaila, N., & Nasution, Y. S. J. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Bos: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, *7*(2), 1848-1863. https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1717

Panjaitan, S., Kewo, C. L., & Moroki, F. O. (2025). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Ekonomi*, *Kependidikan*, *Manajemen*, *dan Akuntansi (JEKMA)*, *3*(1), 134–141.

BPK RI. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan*, *Kebudayaan*, *Riset*, *dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.

Pradana, M. D., Kristiyanti, L. M. S., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Dan Transparansi Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Studi kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Simo dan Bendosari. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, *4*(2), 698-707. https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.124

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Simanjuntak, M. N., Nafiati, D. A., & Hendaryati, N. (2024). Menuju pendidikan berintegritas: Studi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. *Journal of Education Research*, *5*(4), 6191-6197.

Sine, E. P., Tunti, M. E. D., & Rafael, S. J. M. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi pada sekolah di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, *9*(1), 1-8. https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3925

Wiguna, T., Kartini, T., & Nurmilah, R. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *3*(4), 244–258. https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i4.360

Fadhilah, K. U., Lating, A. I. S., Sidarta, A., & Rabbani, S. F. R. (2023). Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya. *J. Buana Akunt*, *8*(2), 151-167. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i2.5646

Copyright © 2026, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.